

COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY IN DEVELOPING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) USING THE PENTAHHELIX SYSTEM

COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY IN DEVELOPING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) USING THE PENTAHHELIX SYSTEM

Lutfi Rahmawaty¹, Nungki Sri Mulyani², Tubagus Faturrahman³, Nurlaili Rahmawati⁴

^{1,2}Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: lutfi.rahmawaty.20@mhs.uinjkt.ac.id , nungki.srimulyani20@mhs.uinjkt.ac.id ,
tubagus.fathurrahman20@mhs.uinjkt.ac.id , rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Abstrak: Pengembangan ekonomi nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah karena UMKM dapat mengurangi permasalahan kemiskinan yang pasalnya saat ini masih terbilang banyak yang masih menjadi pengangguran di negara Indonesia ini. Dengan adanya sistem *Pentahelix* yang akan dapat memudahkan para pelaku ekonomi untuk mengembangkan bisnisnya, adanya para akademisi, pelaku usaha, komunitas dan pemerintahan sebagai mediator yang mempunyai peranan penting dan paling utama dalam mewujudkan perkembangan ekonomi, melalui sejumlah perusahaan milik negara yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pemerintah sebagai mediator penting dalam mengembangkan beberapa sektor ekonomi seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Dengan memiliki pemerintahan yang baik (good governance) dan dukungan penuh terhadap pelaku usaha kecil serta dengan memanfaatkan media *E-commerce* sebagai sarana pemasaran produk ekonomi akan naik dengan signifikan dan para pelaku UMKM akan lebih matang dan siap untuk bersaing.

Kata kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pentahelix, Good Governance

Abstract: Developing the national economy, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role and should be a top priority for the government because MSMEs can reduce the problem of poverty, because currently there are still a large number of unemployed people in Indonesia. With the existence of the *Pentahelix* system which will make it easier for economic actors to develop their business, there are academics, business actors, communities and government as mediators who have an important and most important role in realizing economic development, through a number of state-owned companies, namely BUMN (Owned Enterprises). The state government as an important mediator in developing several economic sectors such as manufacturing, trade and service industries. By having good governance and full support for small business actors and by utilizing *E-commerce* media as a means of marketing economic products will increase significantly and MSME players will be more mature and ready to compete.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Pentahelix, Good Governance

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Namun, UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam bersaing dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Dahulu saat adanya pandemi Covid-19 kondisi UMKM sangat memprihatinkan, bahkan sampai saat ini pun beberapa masyarakat yang mempunyai usaha kecil masih ada yang belum berkembang sehingga upaya pengumpulan dari sektor sangat dibutuhkan untuk mendukung kebangkitan UMKM. Melihat banyaknya manfaat yang akan diberikan oleh UMKM terhadap daerah, maka Pemerintah berperan penting dalam memberikan dukungan, bertindak dan berkontribusi secara langsung dalam untuk mengembangkan UMKM agar UMKM dapat semakin berkembang dan berkontribusi dengan baik. Sehingga bukan hanya sekedar perhatian saja yang diberikan, melainkan juga kontribusi dan bukti nyata yang diberikan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari UMKM melalui berbagai kegiatan pengembangan.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan UMKM adalah dengan menggunakan sistem pentahelix. Sistem pentahelix melibatkan lima pihak, yaitu pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media. Kolaborasi antara kelima pihak ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan strategi bisnis mereka. Konsep Collaborative Governance sebagai alternatif dasar yang dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan pedesaan sebagai sebuah solusi bagi pihak yang akan mengembangkan dan mengimplementasikan kawasan pedesaan dalam bentuk kebijakan atau pun penelitian. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM. Akademisi dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh UMKM. Industri dapat memberikan akses ke pasar dan teknologi yang

dibutuhkan oleh UMKM. Masyarakat dapat memberikan dukungan dan menjadi konsumen dari produk UMKM. Media dapat memberikan promosi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk UMKM. Kolaborasi antara kelima pihak dalam sistem pentahelix dapat membantu UMKM dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.

Collaborative Governance merupakan penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif (dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan bersama), selain itu Collaborative Governance juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Fatimah, 2021). Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa dengan adanya keterlibatan antara pemerintahan dengan masyarakat dan dengan bantuan serta antusias dan rasa semangat pemerintah untuk mewujudkan perekonomian Indonesia lebih maju dan berkembang pesat serta dikenal di berbagai daerah bahkan negara, pemerintah menjadi peran penting untuk mensukseskan perekonomian masyarakat.

MEODE

Fokus dari pembahasan artikel ini adalah strategi collaborative governance dalam mengembangkan UMKM menggunakan sistem Pentahelix, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif yang menjabarkan fenomena pengembangan UMKM dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka baik Undang-Undang, buku, jurnal serta diperkuat dengan pengamatan fenomena melalui media online serta data yang lain yang dihubungkan dengan data pentingnya strategi collaborative governance dengan sistem pentahelix.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang perekonomiannya belum sepenuhnya beralih dari sektor tradisional ke sektor kontemporer. Indonesia memakai sistem ekonomi " dual-struktur" (struktur ganda) baik perusahaan besar maupun UMKM dapat berpartisipasi dalam perekonomian dan pada akhirnya menjadi tumpuan perekonomian baik nasional maupun daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan UMKM melalui peran pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan munculnya Era Revolusi Industri 4.0 yang sangat teknologis informasi dan komunikasi serta kapabilitas inovasi sebagai pilar daya saing.

Kerjasama yang kuat antara pemerintah, industri, dunia akademik, masyarakat, dan media melalui sistem pentahelix mendorong pertumbuhan berkelanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada (Yahya, A. 2019). Yahya, A., Budimanta, A. F., & Wibisono, H. R. (2019) menyebutkan bahwa Sistem pentahelix menggambarkan hubungan sinergis antara lima pilar utama yang saling berinteraksi dalam mendukung inovasi dan pengembangan UMKM. Dengan strategi tata kelola kolaboratif yang menggunakan pendekatan pentahelix, UMKM dapat memperoleh akses ke pengetahuan, pembiayaan, pelatihan, serta jaringan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang (Yahya et al, 2021).

Selain itu Arif et al (2020) menyebutkan bahwa tata kelola pentahelix memastikan keterlibatan semua pihak terkait dalam merancang kebijakan yang mendukung UMKM dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan mereka. Dalam kerangka pentahelix ini, peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif

sehingga UMKM dapat berkembang dengan lebih mudah (Wibisono, H. R., Arief, S. M., & Widjaja, I. G. 2021). Mitra kerja erat antara sektor bisnis, dunia akademik, dan pemerintahan melalui pendekatan pentahelix membuka peluang bagi inovasi berbasis UMKM (Nugroho, 2021). Strategi pentahelix mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dengan cara mengintegrasikan berbagai sumber daya serta mengurangi hambatan-hambatan tersebut (Saputra, 2021). Hal ini didukung oleh pendapat Purnama (2021) dan Yahya (2022) bahwa Tata kelola pentahelix mendorong pertukaran pengetahuan antara lembaga akademik dan UMKM, sehingga memungkinkan implementasi praktik terbaik dalam skala yang lebih luas. Keterlibatan media dalam model pentahelix mampu meningkatkan visibilitas UMKM, membantu mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sinergi antara pemerintah, industri, dunia akademik, masyarakat, dan media dalam sistem pentahelix merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan UMKM.

Kutipan di atas membahas tentang pentingnya kolaborasi pentahelix dalam pengembangan UMKM. Kolaborasi pentahelix adalah pendekatan yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, industri, dunia akademik, masyarakat, dan media. Berdasarkan kutipan tersebut, kolaborasi pentahelix memiliki beberapa manfaat bagi UMKM, antara lain:

1. Meningkatkan akses UMKM ke berbagai sumber daya, seperti pengetahuan, pembiayaan, pelatihan, dan jaringan.
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.
3. Membuka peluang bagi inovasi berbasis UMKM.

4. Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UMKM.
5. Meningkatkan visibilitas UMKM.

Secara keseluruhan, kutipan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix adalah pendekatan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan UMKM. Berikut adalah beberapa hal spesifik yang dapat dianalisis dari kutipan tersebut:

1. Kerjasama yang kuat antara pemangku kepentingan pentahelix dapat membantu UMKM untuk mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang.
2. Tata kelola pentahelix memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
3. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.
4. Sektor bisnis dapat bermitra dengan dunia akademik untuk mengembangkan inovasi berbasis UMKM.
5. Strategi pentahelix dapat membantu UMKM untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapinya.
6. Keterlibatan media dapat membantu UMKM untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Kutipan tersebut juga menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix adalah pendekatan yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Namun, manfaat yang ditawarkan oleh kolaborasi pentahelix menjadikannya pendekatan yang layak untuk dipertimbangkan

dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan UMKM.

Salah satu sistem pentahelix yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi adalah strategi pemerintah. Secara praktis berbicara, pemerintah Indonesia telah lama peduli dibuktikan dengan telah lamanya memperhatikan strategi pengembangan UKM dan usaha kecil. Namun, kinerja, pertunjukan UMKM sangat berbeda tergantung dari adanya hambatan serta dedikasi dan keseriusan dalam mendirikan UMKM. Sejumlah program pemerintah dalam penumbuhan UMKM menunjukkan komitmen yang kuat untuk memupuk eksistensinya. Karena daripotensi UMKM cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia pada dasarnya memberikan perhatian penting terhadap keberlanjutannya atas potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan. Pemerintah Indonesia pada hakekatnya memberikan perhatian penting terhadap keberlanjutannya dan kemajuan ekonomi. Dukungan dari pemerintah datang baik dari tingkat pusat maupun daerah. Adanya hubungan pemerintahan yang konstruktif menunjukkan adanya komitmen besar dalam mendukung eksistensi UMKM.

Selain fungsi tambahan tersebut, dukungan pemerintah yang kuat (dalam hal pengembangan untuk implementasi kebijakan yang konsisten) baik di pusat maupun daerah, diperlukan agar UMKM dapat bertahan di tengah gelombang - gelombang. Fungsinya, dukungan pemerintah yang kuat (dalam hal pengembangan dan implementasi kebijakan yang konsisten), baik di pusat maupun di daerah, sangat diperlukan agar UMKM dapat bertahan di tengah gelombang wabah. Penghormatan terhadap para pengrajin dan hasil karyanya merupakan salah satu cara masyarakat mendukung UMKM dan dukungan semacam ini sangat penting. Kiprah mereka merupakan salah satu cara masyarakat mendukung UMKM. Meskipun ada ikatan

antara pemerintah dan bisnis, perusahaan memiliki posisi yang relatif mandiri karena tidak diharuskan untuk mematuhi semua arah, perusahaan memegang posisi yang relatif independen. Meski masih dibatasi dengan mematuhi undang-undang pemerintah, mematuhi undang-undang pemerintah, industri kecil memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih arah pengembangan mereka. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2022 metode pemasaran pelaku UMKM terdiri dari:

Tabel 1. metode pemasaran pelaku UMKM

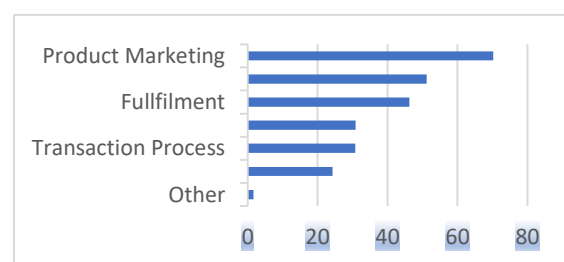
No.	Metode Pemasaran	Presentase (Persen)
1.	Digital (E-Commerce)	16
2.	Non Digital (Pasar)	60
3.	Perantara	8
4.	Pemasaran Lainnya	16

Sumber: KUKM, 2022

Dari data di atas presentase metode pemasaran dengan non digital (pasar) masih sangat tinggi di bandingkan dengan metode pemasaran digital (E-Commerce). Terbukti karna di Indonesia banyak pebisnis yang menjual produk pangan sehingga ia menggunakan metode pemasaran non digital, tetapi tidak terbilang sedikit pula pebisnis yang menggunakan digital sebagai alat pemasaran. Di era revolusi 4.0 ini teknologi digital memiliki peran penting dan sangat bermanfaat untuk semua kalangan manusia. Tetapi dalam metode pemasaran UMKM ini yang memakai metode digital kebanyakan dari kalangan remaja, mereka memakai market place online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lainnya bahkan mereka juga memanfaatkan social

mediana untuk berbisnis, seperti sekarang ini banyak sekali yang memasarkan produk dagangannya melalui social media instagram dan tiktok shop.

Adanya dukungan penuh oleh pemerintah dan memanfaatkan teknologi yang saat ini semakin canggih kemungkinan besar UMKM di Indonesia akan naik dengan signifikan dan jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin berkurang. Apalagi saat ini masyarakat Indonesia sudah banyak sekali yang membuka bisnis dengan menggunakan bisnis *e-commerce* semenjak terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai saat ini banyak sekali yang membuka perekonomian bisnis dengan memanfaatkan *e-commerce* yaitu bisnis yang berbasis digital yang saat pandemi. Covid-19 diproyeksi tumbuh 33,2% persen yang mencapai Rp. 253 triliun menjadi Rp. 337 triliun pada tahun ini. Adanya teknologi yang semakin canggih dan juga dengan kecepatan dan kemudahan transaksi yang sangat membantu akselerasi bisnis digital tersebut. Ketika bertransformasi ke digitalisasi, tentunya UMKM akan menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DSInnovate ke 1.500 pemilik UMKM, ditemukan beberapa kendala yang dialami UMKM:



Gambar 1. Kendala UMKM, 2022

Dari data tersebut, 70,2% pemilik UMKM bermasalah ketika melakukan pemasaran produk. Masalah kedua adalah terkait dengan akses permodalan yaitu mencapai (51,2%), kesediaan bahan baku (46,3%), dan adopsi digital (30,9%). Kesulitan pertama berkaitan dengan mempromosikan

produk. Agar dapat bersaing dengan yang lain, UMKM harus mengembangkan identitas merek yang kuat dan menyediakan produk yang inovatif. Namun, karena keterbatasan sumber daya keuangan, sulit bagi mereka untuk mendedikasikan uang untuk upaya pemasaran. Kesulitan kedua adalah keuangan. Tidak mendapat pinjaman, menurut survei pendapat terbaru Bank Indonesia dalam Laporan Pemberdayaan UMKM 2022 masalah ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi UMKM atau pinjaman keuangan. Untuk menjawab kebutuhan UMKM, penyaluran kredit (oleh bank dan *multifinance*) juga menghadapi sejumlah kesulitan. Memiliki pencatatan menyeluruh, yang mengarah ke laporan keuangan tidak lengkap. Fakta bahwa laporan pembukuan yang tertata dengan baik memungkinkan pemilik usaha untuk memenuhi syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR), antara lain layanan keuangan yang lebih luas.

Kesulitan ketiga adalah adopsi digital. Adopsi digital adalah teknologi digital yang menyajikan empat kesulitan, yaitu kekurangan infrastruktur digital yang terjal dan dapat dipercaya. Indonesia menguasai 40,9% populasi Asia Tenggara milik Asia, menurut Databoks Katadata populasi, menurut Databoks Katadata. dari kepadatan penduduknya yang tinggi, Indonesia masih kekurangan konektivitas internet di banyak lokasi yang jauh atau pedesaan. Akan menjadi tantangan bagi UMKM di wilayah ini untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti e-commerce dan menantang online. Bagi UMKM di wilayah ini untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti e-commerce dan pemasaran online. Mereka berjuang untuk mengakses jaringan internet dan kekurangan perangkat keras yang dapat diandalkan untuk menggunakan teknologi digital seperti laptop dan ponsel, masalahnya adalah tidak adanya pengetahuan digital dan keterampilan antara karyawan UMKM terutama di pedesaan. Kesulitan selanjutnya adalah mendapatkan akses ke sumber keuangan sehingga pemilik

UMKM dapat berinvestasi sedang mendapatkan infrastruktur dan teknologi digital dengan mengambil pinjaman usaha dari bank. Menurut International Finance Corporation, salah satu hambatan terbesar digitalisasi UMKM di negara berkembang adalah kurangnya pembiayaan Korporasi Keuangan Internasional. Menurut data hampir 60 % UMKM di negara berkembang tidak memiliki akses ke pinjaman formal, sehingga sulit bagi mereka untuk berinvestasi dalam teknologi digital. Konteks Peran Korporasi dalam E-commerce dan Perkembangan UMKM Berbasis Digital: Era industri 4.0 menandai perubahan signifikan dalam dunia bisnis, di mana E-commerce menjadi kunci dalam mengembangkan UMKM berbasis digital. UMKM menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi wirausaha digital, termasuk penggunaan perangkat lunak pendukung seperti jejaring sosial, blog, dan platform E-commerce untuk ekspansi global. Pengembangan materi dengan berbagai bahasa yang disesuaikan dengan negara tujuan menjadi penting dalam menghadapi pasar global. Meskipun penting, masih ada bisnis yang belum sepenuhnya terlibat dalam pasar digital ini. Model Penta Helix dalam Penelitian Digital Entrepreneurship:

1. Model Penta Helix mencakup lima elemen: akademisi, pelaku bisnis, lingkungan, pemerintah, dan media.
2. Akademisi berperan dalam standarisasi prosedur perusahaan, akreditasi sumber daya manusia, dan barang. Mereka juga berfungsi sebagai pencetus ide.
3. Pelaku bisnis memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM dan mencapai tujuan bersama.
4. Lingkungan menciptakan lokasi yang mendorong perkembangan bisnis dan inovasi.
5. Pemerintah berperan sebagai pengatur yang menciptakan kondisi bisnis yang etis dan aman.
6. Media digunakan untuk iklan, promosi,

dan pemasaran.

Peran pemerintah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan aman. Media menjadi alat penting dalam pemasaran dan promosi UMKM. Meningkatkan Jangkauan dan Adaptasi Teknologi: UMKM dapat meningkatkan jangkauan pelanggan melalui media digital dengan memahami penggunaan multimedia di era digital. Dengan memanfaatkan platform E-commerce, UMKM dapat mengurangi biaya pemasaran dan memanfaatkan media sosial untuk membantu pembeli dalam pembelian. Adaptasi teknologi elektronik dan internet dapat meningkatkan efisiensi UMKM. Penetrasi Pasar ASEAN dan Dampaknya adalah setelah memahami penggunaan multimedia dan mengoptimalkan platform E-commerce, UMKM dapat melakukan penetrasi pasar ASEAN. Ekspansi ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan potensi keuntungan UMKM.

Collaborative governance adalah bentuk pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pengembangan UMKM berbasis digital, collaborative governance dapat diwujudkan melalui sistem pentahelix, yaitu kolaborasi antara lima pemangku kepentingan, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, media, dan masyarakat. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam pengembangan UMKM berbasis digital. Akademisi berperan dalam memberikan dukungan riset dan pengembangan, bisnis berperan dalam menyediakan modal dan teknologi, pemerintah berperan dalam memberikan regulasi dan insentif, media berperan dalam mempromosikan produk dan jasa UMKM, dan masyarakat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk mewujudkan collaborative governance dalam pengembangan UMKM berbasis digital,

pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi. Lingkungan yang kondusif meliputi tersedianya regulasi yang mendukung kolaborasi, adanya infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta adanya insentif dan dukungan finansial (Wahyuningsih, E. 2021).

Selain itu Maturbongs, P., & Lekatompessy, F. S. (2020) menyebutkan bahwa, pemerintah juga perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Komunikasi dan koordinasi yang efektif diperlukan untuk menjaga kesamaan visi dan misi dalam pengembangan UMKM berbasis digital. Berikut adalah beberapa strategi collaborative governance dalam pengembangan UMKM berbasis digital menggunakan sistem pentahelix:

1. Pembentukan forum kolaborasi

Forum kolaborasi merupakan wadah bagi pemangku kepentingan untuk bertemu dan berdiskusi untuk membahas pengembangan UMKM berbasis digital. Forum kolaborasi dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

2. Pengembangan kebijakan yang mendukung kolaborasi

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kolaborasi dalam pengembangan UMKM berbasis digital. Kebijakan tersebut dapat berupa regulasi, insentif, atau dukungan finansial.

3. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas

Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kolaborasi dalam pengembangan UMKM berbasis digital. Infrastruktur dan fasilitas tersebut dapat berupa sarana pelatihan,

permodalan, atau promosi.

4. Pemberdayaan masyarakat

Pemerintah perlu memberdayakan masyarakat untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis digital. Pemberdayaan masyarakat dapat berupa pelatihan, pendampingan, atau pemberian insentif. Dengan menerapkan strategi collaborative governance, diharapkan pengembangan UMKM berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan mengungkap pentingnya peran korporasi dalam E-commerce dan pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. Ditemukan bahwa UMKM menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi wirausaha digital dan menguasai perangkat lunak pendukung. Model Penta Helix, dengan komponen akademisi, pelaku bisnis, lingkungan, pemerintah, dan media, menunjukkan bagaimana setiap elemen berkontribusi pada pengembangan UMKM. Pemanfaatan media digital dan adaptasi teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi UMKM. Pemerintah dan sektor swasta dapat menyediakan sumber daya untuk pelatihan UMKM dalam wirausaha digital. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan bahwa kolaborasi aktif antara semua pihak akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan UMKM berbasis digital dan ekonomi secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arief, S. M., Widjaja, I. G., & Wibisono, H. R. (2020). Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM: Pendekatan

pentahelix. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1-10.

Astri Siti Fatimah. (2021, November). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 2(3), 157-170.

Berikut adalah daftar pustaka dalam gaya APA dari 10 sumber yang Anda berikan:

Maturbongs, P., & Lekatompessy, F. S. (2020). Kolaborasi pentahelix untuk mendorong pemberdayaan UMKM di Desa Pabean Udik. *Prosiding Konferensi / Seminar UPN Veteran Jakarta*.

Nugroho, S. W., Widjaja, I. G., & Wibisono, H. R. (2021). Peran akademisi dalam pengembangan UMKM berbasis pentahelix. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(3), 1-10.

Purnama, S. H., Widjaja, I. G., & Wibisono, H. R. (2021). Peran media dalam pengembangan UMKM berbasis pentahelix. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(5), 1-10.

Saputra, S. E. W., Widjaja, I. G., & Wibisono, H. R. (2021). Peran masyarakat dalam pengembangan UMKM berbasis pentahelix. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(4), 1-10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2013). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Wahyuningsih, E. (2021). Strategi kolaboratif pentahelix dalam pengembangan UMKM berbasis digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UBS*, 11(2), 137-149.

Wibisono, H. R., Arief, S. M., & Widjaja, I. G. (2021). Kebijakan pemerintah untuk pengembangan UMKM berbasis pentahelix. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 1-10.

Yahya, A. (2019). Kolaborasi pentahelix untuk

peningkatan UMKM. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Yahya, A. (2022). Pentahelix governance: The key to sustainable development of SMEs. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 25(1), 1-13.

Yahya, A., Budimanta, A. F., & Wibisono, H. R. (2019). Strategi pentahelix untuk pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(1), 1-13.

Yahya, A., Nugroho, S. W., Saputra, S. E. W., Purnama, S. H., & Wibisono, H. R. (2021). Pentahelix governance for sustainable development of SMEs in Indonesia: A case study. *Journal of Sustainable Development*, 12(11), 640-654.